

# KEGAGALAN REVOLUSI MENTAL DAN PENATAAN BIROKRASI

## *The Failure of the Mental Revolution and Bureaucratic Reform*

Faisyals; Salomon A.M. Babys

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Bung Karno

**Abstract:** *This conceptual-descriptive study discusses corruption, the Mental Revolution program, and rent-seeking practices in the Indonesian bureaucracy. It uses a qualitative literature-based approach and illustrates the discussion with publicly reported corruption cases involving tax and customs officials. The analysis describes the Mental Revolution as an intended transformation from a service-demanding, unproductive, and corrupt bureaucracy toward a serving, productive, clean, and professional administration. It argues that persistent corruption, abuse of authority, procurement manipulation, and rent seeking indicate a gap between these normative goals and bureaucratic practice. Consumer culture and status-oriented lifestyles are proposed as factors that may intensify material incentives among officials. However, the study does not provide a systematic case sample, program indicators, implementation data, interviews, or longitudinal evidence. The reported cases therefore illustrate corruption risks but cannot independently establish the nationwide failure of the Mental Revolution or a causal relationship between consumer culture and corruption. The study concludes that bureaucratic reform requires transparent procurement, asset and conflict-of-interest controls, enforceable sanctions, measurable service standards, institutional oversight, and evaluation based on documented outcomes.*

**Keywords:** Rent-seeking bureaucracy; Corruption; Bureaucratic reform; Rent seeking; Mental Revolution

**Abstrak:** Kajian konseptual-deskriptif ini membahas korupsi, program Revolusi Mental, dan praktik perburuan rente dalam birokrasi Indonesia. Pendekatan kualitatif berbasis literatur digunakan dengan ilustrasi kasus korupsi pejabat pajak dan bea cukai yang diberitakan secara publik. Revolusi Mental dipahami sebagai transformasi dari birokrasi yang ingin dilayani, tidak produktif, dan koruptif menuju birokrasi yang melayani, produktif, bersih, dan profesional. Korupsi yang terus terjadi, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi pengadaan, dan perburuan rente menunjukkan kesenjangan antara tujuan normatif tersebut dan praktik birokrasi. Budaya konsumsi serta gaya hidup berorientasi status diajukan sebagai faktor yang mungkin memperkuat insentif material pejabat. Namun, penelitian tidak menyediakan sampel kasus sistematis, indikator program, data implementasi, wawancara, atau bukti longitudinal. Kasus yang dikutip karena itu menggambarkan risiko korupsi, tetapi tidak cukup untuk membuktikan kegagalan Revolusi Mental secara nasional maupun hubungan kausal antara budaya konsumsi dan korupsi. Reformasi birokrasi memerlukan transparansi pengadaan, pengendalian aset dan konflik kepentingan, sanksi yang dapat ditegakkan, standar pelayanan terukur, pengawasan institusional, serta evaluasi berbasis hasil terdokumentasi.

**Kata Kunci:** Birokrasi rente; Korupsi; Reformasi birokrasi; Rent seeking; Revolusi Mental

## 1. Pendahuluan

Korupsi dalam birokrasi merusak pelayanan publik, mengurangi efisiensi belanja negara, meningkatkan biaya ekonomi, dan mengalihkan sumber daya dari kepentingan masyarakat. Sumber membuka pembahasan dengan kasus pejabat pajak dan bea cukai yang diberitakan pada 2023 sebagai ilustrasi penyalahgunaan kewenangan dan akumulasi kekayaan yang dipersoalkan publik.

Kasus individual tidak dengan sendirinya mewakili seluruh birokrasi, tetapi memperlihatkan pentingnya sistem pencegahan, pelaporan kekayaan, pemeriksaan transaksi, pengendalian gratifikasi, dan penegakan hukum. Kajian ini menelaah mengapa agenda perubahan mental birokrasi dinilai belum menghasilkan pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan melayani.

Fokus kajian meliputi konsep korupsi, tujuan Revolusi Mental, birokrasi rente, dampak ekonomi, serta hubungan yang diajukan sumber antara budaya konsumsi, gaya hidup, dan perilaku materialistik pejabat.

## 2. Kerangka Konseptual

### 2.1. Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan; serta tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

### 2.2. Revolusi Mental dalam Birokrasi

Revolusi Mental diarahkan pada perubahan cara berpikir, merasa, bekerja, dan melayani. Dalam birokrasi, perubahan tersebut diterjemahkan dari orientasi ingin dilayani menjadi melayani, dari tidak produktif menjadi produktif, dan dari perilaku koruptif menjadi bersih serta profesional.

**Tabel 1:** Transformasi yang Dituju

| Dimensi         | Masalah/mechanisme     | Implikasi                  |
|-----------------|------------------------|----------------------------|
| Orientasi       | Ingin dilayani         | Melayani publik            |
| Produktivitas   | Tidak/kurang produktif | Produktif dan terukur      |
| Integritas      | Koruptif dan KKN       | Bersih dan akuntabel       |
| Profesionalitas | Prosedur berbelit      | Standar layanan yang jelas |

Sumber: sintesis konsep dan pembahasan naskah sumber.

### 2.3. Rent Seeking dan Birokrasi Rente

Rent seeking terjadi ketika kewenangan politik atau administratif digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak berasal dari penciptaan nilai. Bentuknya dapat berupa manipulasi regulasi, monopoli, perizinan khusus, pengaturan pengadaan, atau akses istimewa bagi kelompok tertentu (Rachbini, 2005; Firmansyah, Haeril, & Akhyar, 2025).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menyebut dirinya sebagai studi fenomenologis. Objeknya dibatasi pada korupsi birokrasi, kegagalan implementasi Revolusi Mental, dan pembentukan birokrasi rente. Bahan analisis berasal dari literatur, regulasi, publikasi edukasi antikorupsi, dan berita kasus.

Sumber tidak menjelaskan strategi pencarian literatur, periode observasi, kriteria pemilihan kasus, unit analisis, teknik pengodean, wawancara, atau data implementasi program. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat dipahami sebagai esai analitis berbasis literatur dan ilustrasi kasus, bukan fenomenologi empiris yang mendokumentasikan pengalaman partisipan.

Keterbatasan utama meliputi pemilihan kasus yang tidak sistematis, tidak tersedianya indikator program, tidak adanya data kausal atau longitudinal, serta tidak adanya perspektif pengguna layanan. Keterbatasan ini membatasi generalisasi dan menuntut evaluasi lintas lembaga berbasis baseline, target, hasil, audit, survei integritas, dan pengalaman masyarakat.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Kesenjangan Tujuan dan Praktik

Tujuan Revolusi Mental birokrasi adalah pemerintahan bersih, produktif, profesional, dan berorientasi pelayanan. Sumber menilai tujuan tersebut belum tercapai karena kasus korupsi dan gratifikasi tetap muncul. Temuan ini menunjukkan kesenjangan normatif, tetapi tingkat kegagalan program tidak dapat diukur tanpa indikator, baseline, target, cakupan lembaga, dan data perubahan dari waktu ke waktu.

**Tabel 2:** Kesenjangan Implementasi

| Dimensi     | Masalah/mechanisme                      | Implikasi                  |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Bersih      | Kasus korupsi dan gratifikasi berlanjut | Perlu indikator integritas |
| Melayani    | Orientasi pelayanan belum diukur        | Perlu survei pengguna      |
| Produktif   | Kinerja tidak dibandingkan              | Perlu baseline dan target  |
| Profesional | Standar belum dievaluasi                | Perlu audit layanan        |

Sumber: sintesis konsep dan pembahasan naskah sumber.

#### 4.2. Dampak Korupsi terhadap Ekonomi dan Pelayanan

Korupsi mengurangi kualitas belanja publik, menghambat investasi, dan memindahkan sumber daya ke kepentingan privat. Dalam pengadaan infrastruktur, mark-up, pengurangan spesifikasi, dan pembagian rente dapat menghasilkan bangunan bermutu rendah, umur layanan pendek, dan risiko keselamatan.

Dampak tersebut tidak berhenti pada kerugian fiskal. Masyarakat kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan yang seharusnya dibiayai negara. Karena itu, evaluasi korupsi perlu mengukur kerugian sosial dan kualitas layanan, bukan hanya nilai uang yang diselewengkan.

**Tabel 3:** Dampak Korupsi

| Dimensi   | Masalah/mechanisme                   | Implikasi            |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| Fiskal    | Kebocoran dan mark-up                | Kerugian anggaran    |
| Ekonomi   | Biaya tinggi dan investasi terhambat | Pertumbuhan melemah  |
| Layanan   | Mutu infrastruktur/layanan turun     | Hak publik berkurang |
| Institusi | Kepercayaan dan legitimasi menurun   | Kepatuhan melemah    |

Sumber: sintesis konsep dan pembahasan naskah sumber.

#### 4.3. Mekanisme Birokrasi Rente

Birokrasi rente muncul ketika pejabat menggunakan kewenangan untuk memengaruhi keputusan ekonomi, menciptakan hambatan masuk, atau mengarahkan regulasi dan pengadaan. Hubungan antara birokrat, aktor politik, dan pelaku usaha dapat menghasilkan lisensi, tarif, monopoli, atau spesifikasi teknis yang menguntungkan kelompok tertentu.

Praktik tersebut meningkatkan biaya tanpa menaikkan kualitas produksi. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk bahan, tenaga, dan mutu layanan dialihkan menjadi biaya politik atau keuntungan privat. Pencegahan harus menutup peluang diskresi tidak terkendali dan memperkuat audit jejak keputusan.

**Tabel 4:** Rantai Birokrasi Rente

| Dimensi          | Masalah/mekanisme            | Implikasi           |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Akses kewenangan | Diskresi, izin, regulasi     | Peluang rente       |
| Manipulasi       | Spesifikasi, tarif, monopoli | Pesaing tersisih    |
| Pertukaran       | Keuntungan privat/politik    | Konflik kepentingan |
| Dampak           | Biaya naik, mutu turun       | Kerugian publik     |

Sumber: sintesis konsep dan pembahasan naskah sumber.

#### 4.4. Budaya Konsumsi dan Gaya Hidup

Sumber menggunakan konsep budaya konsumen untuk menjelaskan orientasi terhadap kepemilikan, prestise, dan status. Gaya hidup dapat menciptakan tekanan material, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai penyebab langsung korupsi tanpa data perilaku, perbandingan kelompok, serta pengendalian faktor pendapatan, kesempatan, norma organisasi, dan penegakan hukum (Lury, 1998; Featherstone, 2015).

Analisis yang lebih kuat menempatkan gaya hidup sebagai salah satu faktor risiko pada tingkat individu yang berinteraksi dengan kesempatan struktural, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, budaya organisasi, dan probabilitas sanksi.

#### 4.5. Penataan Birokrasi Berbasis Sistem

Perubahan mental perlu ditopang desain institusi. Pendidikan etika tidak memadai jika proses pengadaan tidak transparan, deklarasi aset tidak diverifikasi, konflik kepentingan tidak dikelola, pelapor tidak dilindungi, dan sanksi tidak konsisten.

**Tabel 5:** Agenda Penataan Birokrasi

| Dimensi    | Masalah/mekanisme                           | Implikasi                    |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Pencegahan | Digitalisasi proses dan keterbukaan data    | Mengurangi diskresi tertutup |
| Integritas | Verifikasi aset dan konflik kepentingan     | Mendeteksi risiko            |
| Pengawasan | Audit, perlindungan pelapor, kontrol publik | Meningkatkan deteksi         |
| Penegakan  | Sanksi konsisten dan pemulihan aset         | Meningkatkan efek jera       |
| Evaluasi   | Indikator layanan dan survei integritas     | Mengukur hasil               |

Sumber: sintesis konsep dan pembahasan naskah sumber.

#### 4.6. Batas Klaim Kegagalan

Judul sumber menyatakan kegagalan Revolusi Mental, tetapi bukti yang disajikan terutama berupa literatur dan beberapa ilustrasi kasus. Klaim yang dapat dipertahankan adalah adanya kesenjangan implementasi dan persistensi risiko korupsi. Kesimpulan mengenai kegagalan nasional memerlukan evaluasi program yang sistematis.

### 5. Kesimpulan

Korupsi dan perburuan rente bertentangan dengan tujuan Revolusi Mental untuk membentuk birokrasi bersih, produktif, profesional, dan melayani. Penyalahgunaan kewenangan, manipulasi pengadaan, dan akses istimewa dapat meningkatkan biaya ekonomi serta menurunkan mutu pelayanan publik.

Kasus yang dibahas menunjukkan bahwa perubahan nilai belum cukup tanpa reformasi sistem. Namun, penelitian ini belum mengukur kinerja program secara nasional. Evaluasi lanjutan harus menggunakan indikator terukur, data lintas waktu dan lembaga, audit pengadaan, pelaporan aset, survei integritas, data penindakan, serta pengalaman pengguna layanan.

#### Daftar Pustaka

- Baswir, Revrisond. 1999. Dilema Kapitalisme Perkoncoan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baswir, Revrisond. 2010. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Featherstone, Mike. 2015. Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage.
- Firmansyah, Haeril, & Akhyar. 2025. Dinamika Kuasa Lokal dan Politik Anggaran. Jispendiora, 4(1).
- Lury, Celia. 1998. Budaya Konsumen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rachbini, Didik J. 2005. Analisis Ekonomi Pemburu Rente. Suara Merdeka, 28 November.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong, & Sutinah, eds. 2014. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Tirta Firdaus, Sukma Umbara, & Hasbullah Hasbullah. 2019. Revolusi Mental Birokrasi di Indonesia. Public Corner, 14(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

